

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian selanjutnya sehingga peneliti dapat membandingkan hasil dari penelitian terdahulu dengan yang didapatkan peneliti. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun) dan Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Desy Mariani (2017) “Pengaruh Penerapan <i>Green Accounting</i> , Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR Terhadap Pengungkapan CSR dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening”	1. <i>Green Accounting</i> (X1) 2. Kepemilikan Saham Publik (X2) 3. Publikasi Media (X3) 4. Kinerja Keuangan (Y1) 5. Pengungkapan CSR (Y2)	<i>Green Accounting</i> dan Publikasi CSR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Kepemilikan Saham Publik berpengaruh dan signifikan terhadap Pengungkapan CSR, <i>Green Accounting</i> , Kepemilikan Saham Publik, Publikasi CSR Bersama sama tidak mempengaruhi pengungkapan CSR melalui Kinerja Keuangan.
2	<ul style="list-style-type: none">• Bima Dwi Darma• Fefri Indra Arza• Halmawati (2019)	1. Pengungkapan Media (X1) 2. Kinerja Lingkungan (X2)	Pengungkapan Media berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR, Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas

	<p>“Pengaruh Pengungkapan Media, Kinerja Lingkungan dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR”</p>	<p>3. Kepemilikan Asing (X3)</p> <p>4. Pengungkapan CSR (Y)</p>	<p>pengungkapan CSR, Kepemilikan Asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.</p>
3	<p>Sri Rahmayanty (2015)</p> <p>Pengaruh <i>Size</i> Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik, Kepemilikan Saham Asing, dan Profitabilitas Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR.</p>	<p>1. <i>Size</i> Perusahaan (X1)</p> <p>2. Kepemilikan Saham Publik (X2)</p> <p>3. Kepemilikan Saham Asing (X3)</p> <p>4. Profitabilitas Perusahaan (X4)</p> <p>5. <i>Corporate Social Responsibility</i> (Y)</p>	<p><i>Size</i> Perusahaan dan Kepemilikan Saham Asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan Kepemilikan Saham Publik dan Profitabilitas Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p>
4	<ul style="list-style-type: none"> • Puji Rahayu 	<p>1. Kepemilikan Saham Publik (X1)</p>	<p>Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Indah Anissyukurlill Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas dan Media terhadap Tanggung Jawab Sosial 	2. Profitabilitas (X2) 3. Pengungkapan Media (X3) 4. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (Y)	diambil kesimpulan bahwa peneliti ini menunjukkan bahwa variable kepemilikan saham public berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab social.
5	Mahrisa Mahdia Khoirina <i>Analysis of Green Accounting to Suport Corporate Social Responsibility</i>	1. <i>Analysis Green Accounting</i> (X1) 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> (Y)	This study aims to determine how to vonduct environmental management and the application of the concept of <i>Green Accounting</i> . The research results revealed that Semen Gresik Hospital has not implemented the concept of <i>Green Accounting</i> yet..

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Kontak Sosial (*Social Theory*)

Kontrak social (*social contract*) muncul adanya interelasi dalam kehidupan social masyarakat. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki

kesamaan tujuan dan berusaha mencapai tujuan bersama, adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat dimana antara keduanya saling pengaruh- mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan (*equality*), maka perlu kontrak social (*social contract*) baik secara eksplisit maupun implisit sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya (Hadi, 2011, hal. 95)

2.2.2 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) sebagaimana terjadi selama ini namun bergeser menjadi lebih luas, yaitu sampai pada ranah social kemasyarakatan (Stakeholder). Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun Eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. (Hadi, 2011)

2.2.3 Teori Legimitasi (*Legimitasi Theory*)

Legimitasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) dalam (Hadi, 2011) berpendapat legitimitasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimitasi merupakan manfaat atau sumberdaya

potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*). (Hadi, 2011, hal. 87)

2.2.4 Green Accounting

2.2.4.1 Penegertian Green Accounting

Menurut (Lako, 2018, hal. 99) menjelaskan bahwa akuntansi hijau (*green accounting*) adalah suatu proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi berkenaan dengan transaksi, peristiwa, dan atau objek keuangan, social dan lingkungan secara terpadu dalam proses akuntansi agar dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu, utuh dan relevan yang berguna bagi pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.

Sedangkan menurut (Ikhsan, 2008, hal. 13) mendefinisikan *Green Accounting* adalah *Green Accounting* atau *Environmental Accounting* merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan (*Environmental Costs*) ke dalam praktek akuntansi perusahaan atau Lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan.

2.2.4.2 Tujuan Green Accounting

Menurut (Lako, 2018, hal. 99) tujuan dari *Green Accounting* adalah untuk menyajikan informasi akuntansi keuangan (ekonomi), informasi akuntansi social, dan informasi akuntansi lingkungan secara terpadu dalam satu paket

pelaporan akuntansi agar bisa digunakan para pihak yang berkepentingan dalam penilaian dan pengambilan keputusan investasi, ekonomi, manajerial dan lainnya.

2.2.4.3 Karakteristik *Green Accounting*

Menurut (Lako, 2018, hal. 102) terdapat lima karakteristik kualitatif. Kriteria atau syarat utama dalam penyajian informasi Akuntansi Hijau adalah :

- 1) Terintegrasi dan akuntabel, yaitu informasi akuntansi yang disajikan dalam pelaporan Akuntansi Hijau harus memperhitungkan, mengintegrasikan, social, dan lingkungan secara terpadu dalam satu paket pelaporan.
- 2) Relevan, yaitu informasi yang disajikan harus relevan dengan kebutuhan para pemakai dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang disajikan harus memiliki nilai umpan-balik dan nilai predektif, serta disajikan tepat waktu.
- 3) Reliabel, yaitu informasi akuntansi yang disajikan harus reliabel atau andal agar dapat dipercaya dan bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi. Untuk itu, informasi akuntansi yang disajikan harus dapat diverifikasi, valid, akurat, dan netral.
- 4) Transparan, yaitu informasi akuntansi harus disajikan secara transparan dan jujur.
- 5) Keterbandingan, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memiliki daya banding antar periode dan disajikan secara konsisten dari waktu ke waktu.

2.2.4.4 Pengukuran *Green Accounting*

Menurut (Zulkifli, 2018, hal. 271) pengukuran *Green Accounting* dapat diukur melalui Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut PROPER) adalah program penilaian terhadap upaya tanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. PROPER diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2013 tentang Program Penilaian Pringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai mekanisme dan kriteria penilaian PROPER. Kriteria penilaian proper dibagi menjadi dua :

- 1) Kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam. Pada dasarnya, kriteria ketaatan adalah penilaian ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan hidup. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penilaian adalah sebagai berikut :
 - a) Penerapan Dokumen Lingkungan
 - b) Pengendalian Pencemaran Air
 - c) Pengendalian Pencemaran Udara
 - d) Pengelolaan Kerusakan Lingkungan
- 2) Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*)

untuk peningkatan hijau dan emas. PROPER dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Insentif atau disinsentif diberikan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:

- a) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
- b) Pengendalian perusahaan lingkungan hidup.
- c) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Penilaian untuk kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diberikan dalam bentuk peringkat kinerja yang terdiri atas :

- a) Hitam; Sangat Buruk; Skor 1, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.
- b) Merah; Buruk; Skor 2, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Biru; Cukup; Skor 3, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Hijau; Baik; Skor 4, diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*) melalui pelaksanaan system manajemen lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang baik.

- e) Emas; Sangat baik; Skor 5 diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (*environmental excellency*) dalam proses produksi dan/atau jasa serta melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

2.2.5 Kepemilikan Saham Publik

Kepemilikan saham publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga banyak pula butir-butir informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu juga semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi.

Menurut (Rahayu, 2015, hal. 21) menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh publik maksudnya adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Semakin

besar kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi perusahaan. selain itu juga semakin besar saham yang dimiliki publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan.

Sedangkan, menurut (Na'im & Fuad, 2005) menjelaskan bahwa kepemilikan publik adalah proporsi saham yang dimiliki publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau instansi yang memiliki saham dibawah 5% (<5%) yang berada diluar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% biasanya merupakan gabungan kepemilikan dari banyak masyarakat. Kelompok pemegang saham ini disebut dengan pemegang saham publik. Pemegang saham publik biasanya merupakan pemegang saham minoritas perusahaan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham publik merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik atau masyarakat yang memiliki saham dibawah 5% dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Kepemilikan saham publik dapat dilihat dalam laporan tahunan perusahaan. Besarnya saham publik atau masyarakat dapat diukur dengan rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham publik terhadap total lembar saham perusahaan. Pengukuran untuk kepemilikan saham publik ini dapat digunakan rumus (Rifqiyah, 2016) :

$$\text{KSP} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Lembar Saham Publik}}{\text{Total Lembar Saham}} \times 100\%$$

2.2.6 Pengungkapan Media

2.2.6.1 Pengertian Pengungkapan Media

Menurut (Rahayu, 2015) menjelaskan bahwa Pengungkapan media adalah bagaimana perusahaan memanfaatkan media yang tersedia untuk mengkomunikasikan identitas serta informasi mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengkomunikasikan kegiatan perusahaannya dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, salah satu kegiatan yang dapat dikomunikasikan adalah CSR. Terdapat tiga media yang biasa digunakan oleh perusahaan yaitu media televisi, koran dan internet.

2.2.6.2 Pengukuran Pengungkapan Media

Menurut (Herawati, 2017) media adalah sumber daya pada informasi lingkungan. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Media menyediakan informasi bagi perusahaan dan dapat pula sebagai alat publikasi serta sosialisasi yang digunakan oleh perusahaan. Ukuran dari pengungkapan media ini dengan menggunakan variabel dummy. Nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR di media eksternal Perusahaan dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan CSR.

2.2.7 Corporate Social Responsibility

2.2.7.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

Menurut (Rusdianto, 2013, hal. 7) Konsep dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengandung arti bahwa organisasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri (selfish). Sehingga teralienasi dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Konsep ini menyediakan jalan bagi setiap perusahaan untuk melibatkan dirinya dengan dimensi social dan memberikan perhatian terhadap dampak-dampak social yang ada.

2.2.7.2 Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility

Crowther Davud dalam (Hadi, 2011, hal. 59) mengurai prinsip-prinsip tanggung jawab social (*social responsibility*) menjadi tiga, yaitu :

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (*action*) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan . akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan.

2.2.7.3 Tujuan *Corporate Social Responsibility*

Penerapan CSR dalam perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (shareholders), tetapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Adapun tujuan dari penerapan CSR adalah :

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas social,
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

2.2.7.4 Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Menurut (Nurkhin, 2009) pengungkapan tanggung jawab social merupakan pengungkapan informasi terkait dengan aktivitas tanggung jawab social perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (Corporate Social Responsibility Disclosure Index) berdasarkan indikator GRI (Global Reporting Initiatives) yang digunakan dalam penelitian

ini diperoleh dari website www.globalreporting.org. Indikator GRI terdiri dari 3 fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dasar sustainability reporting. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia.

Pengukuran CSRDI menggunakan content analysis dalam mengukur variety dari CSRDI. Content analysis adalah salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkap kan Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut:

$$CSRj = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSR_j: *Corporate Social Responsibility* Index perusahaan j

n_j: Jumlah item untuk perusahaan j, n_j = 91 (Skor maksimal)

$\sum X_{ij}$: Jumlah total pengungkapan CSR oleh perusahaan

Dummy variabel, 1 = jika item diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan.

Dengan demikian, $0 < CSR_j < 1$

Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu G4 telah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. GRI-G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global. GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana

menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau pelaporan online. Dalam standar GRI-G4, indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup dan sosial. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan, dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91.

Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor, mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan GRI-G4 guideline. Penjelasan mengenai indikator GRI-G4 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.2

91 Indikator berdasarkan GRI-G4

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan Didistribusikan
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena perubahan iklim
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas imbalan Pasti

	EC4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
KATEGORI EKONOMI		
Keberadaan pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (<i>entry level</i>) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di operasi yang signifikan
Dampak ekonomi Tidak langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak
Praktik pengadaan	EC9	Perbandingan dari pemasok lokal di operasional yang signifikan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat dan Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi

	EN5	Intensitas energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Presentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi dikawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan
KATEGORI LINGKUNGAN		

Emisi	EN14	Jumlah total spesies dalam IUCN RED LIST dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat resiko kepunahan
	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung (cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusal ozon (BPO)
	EN21	NO _x , So _x dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan
	EN23	Bobot total berdasarkan jenis dan metode Pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tumpahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan Basel 2 lampiran I,II,III dan VIII yang diangkut diimpor, diekspor

		atau diolah dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, dan status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasikan menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan
KATEGORI LINGKUNGAN		
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan

		lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	EN34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi.
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Praktik Ketanagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah.
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi karyawan punya waktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat resistensi setelah cuti melahirkan, menurut gender

Hubungan industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan keselamatan kerja	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerjaan yang membantu mengawasi an memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyebab akibat kerja, hari hilang dan kemangkiran serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Praktik Ketanagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja		
Kesehatan dan keselamatan kerja	LA7	Pekerjaan yang sering terkena atau beresiko tinggi karena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan tercakup dalam perjanjian formal serikat pekerja

Pelatiha dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata pertahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara regular menurut gender dan kategori Karyawan
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan perkategori karyawan dan menurut gender, kelompok usia,keanggotaan kelompok minoritas dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerisasi Perempuan dan Laki-Laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen pemasok terkait praktik	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan praktek ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan		
	LA15	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan resmi
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Hak Asasi Manusia		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan/prosedur HAM terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan beresikat dan	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi

perjanjian kerja bersama		melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja paksa atau wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik pengamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi
Hak Adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak

		hak asasi manusia
Asesmen pemasok atas Hak Asasi Manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui pengaduan formal
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Masyarakat		
Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, dampak, dan pengembangan
Masyarakat Lokal	SO2	Operasi dengan dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti Korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi

		dan risiko yang signifikan yang Teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi
	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat
Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidaktepatuhan terhadap undang-undang dan Peraturan
Asesmen pemasok atas dampak terhadap masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negative aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani dan

dampak terhadap masyarakat		diselesaikan melalui mekanisme pengaduan Resmi
KATEGORI SOSIAL		
Sub kategori : Tanggung Jawab atas Produk		
Kesehatan Keselamatan Pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk Peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil
Pelabelan produk dan jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti informasi yang sejenis
	PR4	Jumlah total insiden ketidakmampuan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil

	PR5	Hasil survei untuk mengukur kepuasan Pelanggan
Komunkasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau Disengketakan
	PR7	Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi dan sponsor menurut jenis hasil
Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa

Sumber : www.globalreporting.org

2.3 Pengaruh antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan keberadaanya tidak terbatas dari lingkungan karena perusahaan berada dalam suatu lingkungan tertentu. Sejumlah perusahaan

dituntut untuk lebih memperhatikan masalah lingkungan yang ada. Bentuk tanggung jawab social perusahaan atau CSR merupakan wujud kesadaran perusahaan sebagai upaya meningkatkan hubungannya dengan masyarakat dan lingkungannya. Bentuk tanggung jawab dapat menimbulkan biaya lingkungan. Agar kelangsungan hidup terjaga, perusahaan harus bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan lingkungan meliputi suatu pendekatan menyeluruh atas operasional, produk dan fasilitas perusahaan.

H_1 : Penerapan Green Accounting berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan pengungkapan tanggung jawab social yang lebih besar daripada perusahaan yang sahamnya tidak dikuasai oleh publik. Perusahaan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada investor dan masyarakat luas, tidak hanya berupa laporan keuangan tetapi juga berupa pengungkapan tanggung jawab social. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab social yang semakin besar, karena semakin tingginya kepercayaan investor dan masyarakat luas.

H_2 : Kepemilikan Saham Publik berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

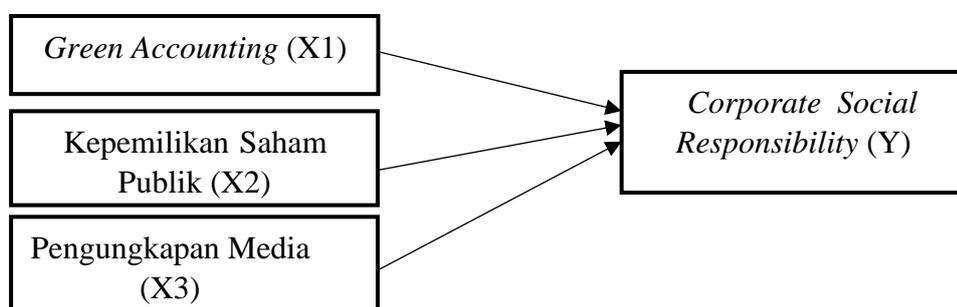
2.3.3 Pengaruh Pengungkapan Media Terhadap *Corporate Social Responsibility*

Komunikasi CSR adalah komunikasi yang dirancang dan didistribusikan oleh perusahaan tentang kegiatan CSR perusahaan tersebut. Komunikasi CSR yang dipercaya adalah komunikasi yang informatif dan mendidik. Ada berbagai media yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan program CSR. Laporan tahunan (*annual report*) adalah media komunikasi utama perusahaan selain untuk menyebarkan informasi tentang posisi keuangan, juga digunakan untuk mengkomunikasikan informasi lingkungan.

H_3 : Pengungkapan Media berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility

2.4 Kerangka Konseptual

Dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik, dan Pengungkapan Media Terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019 maka kerangka konseptual yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



2.4 Gambar Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2013) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah :

Hipotesis 1. Terdapat *pengaruh Green Accounting* terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Hipotesis 2. Terdapat pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Hipotesis 3. Terdapat pengaruh Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility*.

Hipotesis 4. Terdapat pengaruh terhadap *Green Accounting*, Kepemilikan Saham Publik dan Pengungkapan Media terhadap *Corporate Social Responsibility*

